

**PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN TATA KELOLA BUM DESA
BERBASIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI DESA SANDOSI**

**Yosef Dionisius Lamawuran^{1*}, Frans Bapa Tokan², Yohana Fransiska Medho³,
Stephanie Perdana Ayu Lawalu⁴, Kristianus Simon Hale Molan⁵, Eusabius
Separera Niron⁶**

¹⁻⁶Universitas Katolik Widya Mandira

Email Korespondensi: dionlamawuran@unwira.ac.id

Disubmit: 29 Juli 2023

Diterima: 22 Agustus 2023

Diterbitkan: 01 September 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i9.11264>

ABSTRAK

BUM Desa Gute Gelekat desa Sandosi saat ini mengalami permasalahan seperti pemilihan jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan rusaknya mesin produksi usaha. Dampaknya, BUM Desa yang dibentuk pada tahun 2017 ini mengalami stagnasi sejak tahun 2018-2021. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh tim dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan yang berkaitan dengan wawasan dan pengetahuan para pengurus BUM Desa Gute Gelekat dan memberikan input yang konstruktif bagi peningkatan kapasitas pengurus dalam hal manajemen tata kelola BUM Desa Gute Gelekat pada masa mendatang. Metode yang digunakan mencakup analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan PKM ini memberikan beberapa kesimpulan: pertama, minimnya pengetahuan dari pemerintah desa mengakibatkan proses pendirian BUM Desa Gute Gelekat pada tahun 2017 mengabaikan sejumlah hal penting seperti analisis kelayakan usaha, analisis pengelolaan keuangan BUM Desa dan analisis SDM; kedua, prinsip tata kelola berbasis good corporate governance belum sepenuhnya diterapkan oleh pengelola BUM Desa Gute Gelekat, seperti prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainable; ketiga, hasil post test dan pre test menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan.

Kata Kunci: BUM Desa, Manajemen, *Good Corporate Governance*

ABSTRACT

BUM Desa Gute Gelekat of Sandosi Village is currently experiencing problems such as the selection of business types that are not in accordance with the potential of the village and the needs of the community, no accountability report for the use of the budget and damaged business production machines. As a result, this BUM Desa, which was formed in 2017, has stagnated since 2018-2021. This activity was carried out by a team from FISIP Widya Mandira Catholic University with the aim of comprehensively identifying problems related to the insights and knowledge of the management of BUM Desa Gute Gelekat and providing contributive input for increasing the capacity of the

management in terms of BUM Desa Gute Gelekat governance management in the future. The methods used include situation analysis, preparation, implementation and evaluation. The results of this PKM activity provide several conclusions: first, the lack of knowledge from the village government resulted in the process of establishing BUM Desa Gute Gelekat in 2017 ignoring a number of important things such as business feasibility analysis, BUM Desa financial management analysis and HR analysis; second, the principles of good corporate governance have not been fully implemented by the BUM Desa Gute Gelekat manager, such as the principles of cooperative, participatory, innovative, transparent, accountable and sustainable; third, the results of the post test and pre test show that there is an increase in the knowledge of participants after participating in the activity.

Keywords: BUM Desa, Management, Good Corporate Governance

1. PENDAHULUAN

Studi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berikut dinamika ihwal pengelolannya kian menarik dan ramai untuk dikaji secara kritis. BUM Desa menjadi lembaga dengan peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah merealisasikan konsep pembangunan ekonomi lokal atau *Local Economic Development* (Windari, 2021). Hal ini tidak lepas dari peran BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui optimalisasi potensi dan aset desa, menciptakan jaringan pasar yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa (Ridlwani, 2015). Optimalisasi peran BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor penting manajemen pengelolaan yang mencakup manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran (Herudiansyah et al., 2021). Sistem tata kelola BUM Desa perlu dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, bertanggungjawab, dan berkelanjutan (Purnomo, 2016). Keberhasilan dalam penerapan sistem tata kelola diyakini mampu meningkatkan kinerja kerja BUM Desa dalam mencapai tujuannya sebagai lembaga ekonomi desa.

Tercapainya sistem tata kelola BUM Desa yang baik sangat ditentukan pula oleh kompetensi dan profesionalitas kelompok pelaksana. Laporan Forum BUM Desa Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan dan kemampuan manajerial wirausaha dari para pengurus BUM Desa menjadi salah satu penyebab mengapa 90% dari total 27.067 BUM Desa di Indonesia gagal dalam menjalankan usahanya (Lestari et al., 2021). Hasil kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) Ferdiansyah dan Said tentang peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Compo dalam melakukan produk photography menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pengurus dalam urusan manajemen produksi dan pemasaran hanya 27%, hal ini menjadi salah satu pemicu rendahnya nilai produksi dan pemasaran hasil usaha BUMDes (Ferdiansyah & Said, 2022).

Kegiatan PKM ini melibatkan BUM Desa Gute Gelekat desa Sandosi kecamatan Witihama kabupaten Flores Timur sebagai mitra. Pengabdian ini sebagai tindak lanjut atas informasi pada wawancara dan observasi awal yang menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen tata kelola Bum Desa. Fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa implementasi

manajemen tata kelola BUM Desa Gute Gelekat masih relatif rendah. Di era good governance, pelaksanaan tata kelola BUM Desa perlu didorong ke arah good corporate governance (Titania & Utami, 2021; Yuliana & Alinsari, 2022). Pendekatan good corporate governance dengan prinsip tata kelola yang mencakup kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, mampu menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik bagi BUM Desa (Nelly Sari et al., 2022). Ringkasnya manajemen tata kelola yang tinggi akan berdampak terhadap kinerja BUM Desa, sebaliknya pengelolaan BUM Desa dengan prinsip tata kelola yang rendah akan menghambat capaian kinerja BUM Desa (Syam et al., 2020),

Berangkat dari situasi problematis diatas, maka upaya pengembangan BUM Desa melalui penguatan dan peningkatan kapasitas pengurus perlu dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan peran dari lembaga pendidikan tinggi lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program PKM milik perguruan tinggi dipandang sebagai upaya edukasi paling efektif dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengurus BUM Desa. Hal ini dibuktikan pada kegiatan pengabdian di BUM Desa Gempar Desa Pariti Kabupaten Kupang yang mana kegiatan PKM berdampak nyata dalam manajemen pengelolaan dan inovasi usaha BUM Desa (Baunsele et al., 2023).

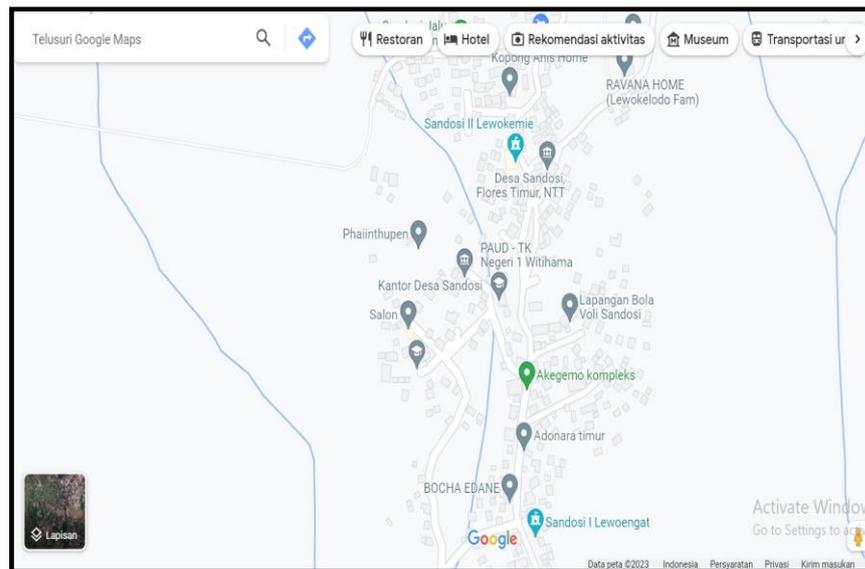
Secara praktis, kegiatan PKM ini berkontribusi bagi peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa, sedangkan manfaat teoritis dari kegiatan ini adalah untuk pengembangan materi mata kuliah manajemen pembangunan pedesaan pada program studi Administrasi Publik. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan yang berkaitan dengan wawasan dan pengetahuan para pengurus BUM Desa Gute Gelekat dan memberikan input yang konstruktif bagi peningkatan kapasitas pengurus dalam hal manajemen tata kelola BUM Desa Gute Gelekat pada masa mendatang.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Hasil analisis situasi yang dilakukan oleh tim mendapati informasi bahwasannya manajemen produksi menjadi problem paling utama yang dialami oleh pihak mitra. Hal ini dikarenakan jenis usaha yang dipilih yakni fotocopy, percetakan dan ATK, dinilai tidak relevan dengan potesi desa yang unggul pada sektor pertanian dan perkebunan. Jenis usaha tersebut juga tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang mayoritas adalah petani. Problem pada sektor produksi berimplikasi terhadap aspek pemasaran sebab produksi usaha percetakan, fotocopy dan ATK sulit mendapatkan target market yang luas di daerah pedesaan. Masalah selanjutnya adalah tentang pengelolaan keuangan yang dinilai tidak transparan dan akuntabel lantaran tidak ada laporan mengenai penggunaan anggaran penyertaan modal awal berikut nilai pemasukan yang didapatkan.

Dari masalah di atas maka rumusan pertanyaan yang coba diajukan dalam pengabdian ini adalah: bagaimana meningkatkan kapasitas manajemen tata kelola berbasis good governance corporate bagi pengelola BUM Desa Gute Gelekat?

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilangsungkan di kantor desa Sandosi kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur, yang terletak di jalan trans Sandosi Dusun 1 RT. 12/RW.09.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. BUM Desa

BUM Desa adalah lembaga usaha yang mulai muncul sejak diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014. Lembaga usaha ini dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Rusdi et al., 2022).

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015, BUM Desa dibentuk dengan tujuan antara lain: meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Kiki Endah, 2018). Hingga saat ini sudah ada 45.549 BUM Desa yang telah dibentuk di seluruh Indonesia (Amri, 2019; Rusdi et al., 2022; Sofyani et al., 2019; Widianingsih et al., 2020)

b. Prinsip Tata Kelola Berbasis Good Corporate Governance

Berdasarkan buku panduan BUM Desa yang diterbitkan Departemen Pendidikan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, disebutkan bahwa ada enam prinsip tata kelola Bum Desa yakni: a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya; b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi (seperti sumbangsi pemikiran atau ide) yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa; c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama

tanpa memandang golongan, suku, dan agama; d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative; f. Sustainabel kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat (Widiastuti et al., 2019).

Kedua konsep dalam tinjauan pustaka ini digunakan untuk menganalisis pertanyaan dalam kegiatan ini yakni: bagaimana meningkatkan kapasitas manajemen tata kelola berbasis good governance coporate bagi pengelola BUM Desa Gute Gelekat? Sedangkan tujuan dari adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tata kelola BUM Desa berbasis good corporate governance kepada pengurus BUM Desa Gute Gelekat desa Sandosi.

4. METODE

Kegiatan PKM ini dilakukan oleh tim dosen dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira di desa Sandosi pada dengan peserta kegiatan berjumlah 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah desa Sandosi, BPD, pengurus BUM Desa dan perwakilan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah audience centered dimana semua peserta berpartisipasi secara aktif selama proses kegiatan berlangsung. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai dari analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap analisis dilakukan untuk membangun komunikasi awal dengan pihak mitra sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dialami, tahap persiapan untuk penyusunan administrasi kerja sama, penentuan dan penyusunan materi pengabdian, tahap pelaksanaan mencakup pemaparan materi tentang manajemen pengelolaan BUM Desa dan penerapan prinsip tata kelola berbasis good corporate governance serta pelaksanaan post test dan pre test dan tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan.



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan PKM

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Situasi

Tahap analisis situasi dilakukan dengan pengamatan dan wawancara awal pra pengabdian pada tanggal 18 Februari 2023 bersama pemerintah desa, BPD, pengurus BUM Desa dan perwakilan masyarakat. Tim menghimpun sejumlah informasi penting mengenai potensi desa Sandosi, profil BUM Desa Gute Gelakat beserta permasalahan yang dialami. Data profil desa Sandosi tahun 2022 menunjukkan jika sektor pertanian dan perkebunan menjadi potensi unggulan desa, disamping sektor peternakan, UMKM dan pariwisata. Komoditi seperti padi ladang, jagung, kacang tanah dan kacang hijau, jambu mete, kelapa, kemiri dan ubi adalah hasil unggulan yang didapatkan dari lahan pertanian yang seluas 145 hektar dan lahan perkebunan seluas 78 hektar.

Tabel 1. Hasil Komoditi Pertanian dan Perkebunan Tahun 2018-2022

Jenis Komoditi	Hasil Pertanian Dan Perkebunan Lima Tahun Terakhir (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	10	9	12	13	11
Jagung	9	10	9	8	10
Kacang Tanah	25	26	24	21	25
Kacang Hijau	20	21	18	17	19
Ubi Kayu	26	28	27	26	27
Kelapa	35	33	31	29	30
Jambu Mete	45	43	44	41	43
Kemiri	1,5	2	2,3	2	2

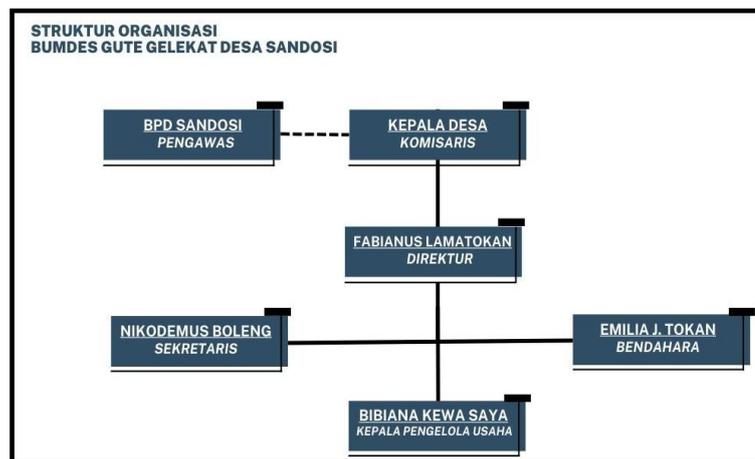
Hasil wawancara bersama perangkat desa dan pengurus BUM Desa mendapati informasi jika BUM Desa Gute Gelekat dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa nomor 5 tahun 2017 dengan jenis usaha yang dipilih adalah fotocopy, percetakan dan ATK dengan pernyataan modal awal sebesar Rp. 60.000.000 untuk pengadaan perangkat usaha antara lain mesin fotocopy, printer dan ATK.



Gambar 3. Kondisi Kantor dan Peralatan Usaha

Namun pada tahun 2018, BUM Desa tidak lagi beroperasi menyusul rusaknya mesin fotocopy dan printer beserta masalah lain seperti mundurnya direktur dan pengurus serta sikap tidak kooperatif pemilik bangunan yang disewakan sebagai lokasi usaha dengan memboikot semua peralatan yang ada dalamnya.

Tidak ada laporan keuangan yang ditinggalkan sehingga tidak diketahui berapa nilai keuntungan yang diperoleh sejak tahun 2017-2018. Pemerintah desa Sandosi kemudian mengaktifkan kembali Bum Desa Gute Gelekat pada tahun 2021 melalui dua keputusan penting. Pertama, melakukan pemilihan pengurus baru setelah para pengurus sebelumnya telah mengundurkan diri. Komposisi pengurus baru dapat dilihat pada gambar 3. Kedua, menganggarkan penyertaan modal senilai Rp. 90.000.000 yang bersumber dari APBDes tahun 2021 yang dimanfaatkan untuk belanja mesin fotocopy, printer dan perlengkapan ATK yang baru. Dari laporan keuangan, diketahui jika total pemasukan yang didapatkan selama dua tahun adalah Rp. 9.842.384 dengan rincian pada tahun 2021 senilai Rp. 4.500.530 dan tahun 2022 senilai Rp. 5.341.854.



Gambar 4. Struktur Organisasi BUM Desa Gute Gelekat

Persiapan

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap analisis situasi, tim kemudian memetakan permasalahan mitra untuk mendesain model PKM. Langkah ini untuk menentukan materi apa saja yang perlu untuk diberikan berikut narasumber guna mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pihak mitra. Tim juga menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai pre test dan post test dalam menguji wawasan manajerial wirausaha dan pelaksanaan prinsip tata kelola BUM Desa bagi para pengurus. Persiapan terakhir yang tidak kalah penting adalah menyiapkan kelengkapan administrasi mulai dari surat kerjasama pelaksanaan kegiatan, berita acara kegiatan, daftar hadir serta backdrop.

Pelaksanaan

Secara keseluruhan kegiatan PKM ini didesain dalam kurun waktu satu bulan mulai dari tahap analisis masalah, persiapan hingga pelaksanaan pelatihan pada tanggal 29 April 2023. Pelaksanaan pelatihan berlangsung di kantor desa Sandosi dari pukul 09.00-14.00 wita dan diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, pengurus BUM Desa dan

beberapa dosen serta mahasiswa FISIP Unwira yang tengah melangsungkan program MBKM Mandiri (Projek Membangun Desa) di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Dekan FISIP Unwira, Bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA, yang juga merupakan salah satu pembicara dalam kegiatan ini. Dekan FISIP Unwira mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Sandosi dan pengurus BUM Desa Gute Gelekat yang telah berkenan menerima tim PkM dari Unwira. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Sandosi, Bapak Yonas Kay Rawa, SP, sekaligus membuka secara resmi kegiatan. Dalam sambutannya, Kades yang baru terpilih ini menyampaikan bahwa kegiatan PKM dari Unwira dalam rangka peningkatan kapasitas BUM Desa adalah yang pertama kali terjadi di desa Sandosi. Oleh karena itu kegiatan ini menjadi input positif bagi pemerintah desa yang juga berencana untuk merevitalisasi peran BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa.



Gambar 5. Kepala Desa Sandosi dan Dekan FISIP Unwira
Dalam Acara Pembukaan Kegiatan PKM

Selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui wawasan dan pengetahuan awal para pengurus BUM Desa tentang manajemen pengelolaan BUM Desa dan penerapan prinsip tata kelola berbasis good corporate governance. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Drs. Frans Bapa Tokan, MA dengan topik yang disampaikan seputar analisis kelayakan usaha, strategi pemasaran hasil produksi, mekanisme pengelolaan keuangan dan pentingnya manajemen SDM pengelola. Analisis kelayakan usaha merupakan mekanisme yang wajib dilakukan oleh setiap BUM Desa yang anggarannya bersumber dari APBDes, sebagaimana yang tertera dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sinarwati et al., 2021). Hal ini penting dilakukan guna menyusun strategi pengembalian modal (break event point) dan pencapaian keuntungan produksi usaha BUM Desa. Proses analisis usaha pun harus disesuaikan dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat akan lebih mudah terealisasi. Tim PKM menyarankan kepada pemerintah desa dan pengurus BUM Des untuk memilih jenis usaha yang kontekstual dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat seperti usaha agribisnis. Jenis usaha ini tidak saja mudah dalam akses produksi tapi juga dalam proses pemasaran sebab target marketnya adalah para petani. Pada aspek pengelolaan keuangan

dianjurkan agar mengadopsi sistem tata kelola sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi (Suharyono, 2019). Pemateri menekankan pula fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah desa dan BPD demi menghindari adanya praktek penyalahgunaan oleh pihak pengelola. Terakhir adalah tentang manajemen SDM yang perlu diperhatikan secara serius guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus. Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa dipandang penting. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam pengelolaan organisasi yang lebih baik, mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dan modal yang dimiliki desa demi kesejahteraan masyarakat desa, hal ini juga cukup membantu menciptakan lapangan kerja baru guna meningkatkan angka kemiskinan serta pengangguran.



Gambar 6. Proses Pemaparan Materi

Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya prinsip tata kelola BUM Desa berbasis good corporate governance (GCG). Materi ini disampaikan oleh Yosef D. Lamawuran, S.Sos, M.Si, dosen dari Prodi Administrasi Publik FISIP Unwira. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa maju dan berkembangnya suatu unit usaha publik seperti BUM Desa, sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaku usaha dalam menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang berbasis pada pendekatan good corporate governance, yang mencakup prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Konsep kooperatif diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan kerjasama dari semua pihak dan kelompok kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa. Dalam konteks yang dialami pihak mitra, tampak jika kerjasama yang terjalin antara pengurus BUM Desa bersama pemerintah, BPD dan masyarakat belum berjalan maksimal. Kekeliruan dalam penentuan jenis usaha menjadi indikasi jika pemerintah desa tidak melibatkan peran dari masyarakat beserta kelompok kepentingan lainnya. Ini juga berdampak terhadap hilangnya peran pengawasan dan pengendalian keuangan oleh pemerintah desa dan BPD.

Partisipatif dimaknai sebagai bentuk sikap sukarela (volunteer) dari semua pihak yang terlibat untuk memberikan dukungan dan kontribusi

terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan untuk kemajuan usaha. Prinsip partisipatif masih dimaknai secara parsial oleh para pengurus BUM Desa di periode pertama. Hal ini terlihat dari adanya tuntutan menggunakan anggaran penyertaan modal awal untuk membayar gaji para pengurus. Tuntutan ini jelas berlawanan dengan amanat Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa anggaran penyertaan modal yang bersumber dari APBDes tidak diperbolehkan untuk membayar gaji pengurus. Pengelolaan BUM Desa mengedepankan asas gotong royong sehingga pada awal pengelolaannya, diharapkan agar pengurus membangun suatu kesepakatan bahwa kompensasi atau honor para pengurus sangat tergantung dari seberapa maju BUM Desa di kelola dan pada tahun-tahun pertama sikap sukarela (*volenteer*) dari para pengurus sangat dituntut dalam menjalankan BUM Desa. Dampak dari pemahaman sepihak ini menjadi salah satu alasan mengapa pengurus periode pertama BUM Desa Gute Gelekat mundur tanpa ada pemberitahuan kepada kepala desa.

Emansipatif dimaksudkan agar iklim kerja BUM Desa dijalankan tanpa memandang latar belakang golongan, suku, agama dan jenis kelamin para pengurus. Prinsip emansipatif sangat penting, sebab di dalam tubuh BUM Desa adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan satu dua orang atau golongan, tidak boleh ada diskriminatif atas nama apa pun. Di Sandosi, nilai emansipatif terbilang baik dimana ada unsur keterwakilan perempuan pada komposisi pengurus baru, meski jumlah ini masih terbilang rendah karena hanya ada 1 orang saja.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pengelola BUM Desa harus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi khususnya informasi keuangan. Melalui transparansi tersebut, masyarakat berkesempatan untuk memberikan umpan balik atas kebijakan yang telah dan akan diambil. Tujuan lain dari pentingnya transparansi pengelolaan anggaran BUMDes adalah peningkatan mutu manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengelola BUM Desa Gute Gelekat perlu menjadikan pengalaman pengelolaan keuangan pada tahun 2017-2018 sebagai pembelajaran. Dengan demikian pihak pengelola BUM Desa wajib untuk melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan hasil usaha pada pemerintah desa, BPD dan masyarakat secara rutin setiap tahunnya.

Penjelasannya selanjutnya adalah tentang prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dipahami sebagai bentuk keharusan dari pelaksana BUM Desa untuk menjamin jika tugas dan kewajiban yang dijalankan olehnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai kinerja pengelola BUM Desa guna mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Dalam kaitannya dengan dengan pengelolaan keuangan, akuntabilitas menjadi aspek yang dibutuhkan sebagai bentuk pengungkapan aktivitas kinerja finansial BUM Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Mamelo et al., 2016). Seperti halnya prinsip transparansi, akuntabilitas pun belum terpenuhi dalam tata kelola BUM Desa Gute Gelekat.

Dan prinsip terakhir adalah *sustainable* berarti upaya untuk melakukan pengembangan dan pelestarian usaha BUM Desa baik oleh

pengurus, pemerintah desa dan masyarakat (Widiastuti et al., 2019). Kaitannya dengan masalah yang terjadi pada pihak mitra, pemateri menyampaikan bahwa upaya pengembangan BUM Desa perlu ditingkatkan dengan mengganti jenis usaha sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat, pun unit usahanya perlu ditambahkan lebih banyak sehingga kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi lebih dinamis yang nantinya tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tapi juga keuntungan bagi BUM Desa.

Pemaparan materi ini mendapatkan respons yang positif dari peserta karena prinsip tata kelola berbasis *good corporate governance* adalah pengetahuan baru yang selama ini belum diketahui oleh pengelola BUM Desa. Pemateri berusaha untuk tidak saja menjelaskan secara konseptual prinsip-prinsip tata kelola berbasis GCG, tapi juga selalu mengaitkan setiap prinsip dengan kondisi eksisting yang dialami oleh pihak mitra dengan begitu nilai-nilai krusial pada setiap prinsip GCG dapat lebih mudah dipahami oleh setiap peserta.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan *post test* untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari para pengurus, setelah mendapatkan input dari kedua materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil dari kedua test tersebut akan dianalisis dan dievaluasi oleh tim untuk selanjutnya diskusikan bersama.

Evaluasi

Setelah pemaparan materi, tim kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil *post test* dan *pre test* dengan hasil penilaian sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Pre Test dan Post Test

No	Nilai	Pre Test		Post Test		% Peningkatan	Interprestasi Keberhasilan
		(f)	%	(f)	%		
1	81-100	1	5%	10	70%	50%	Baik Sekali
2	71-80	3	15%	4	20%	15%	Baik
3	61-70	11	80%	1	5%	60%	Cukup
4	<60						Kurang
Jumlah			100		100		

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, hasil *pre test* menunjukkan bahwa sebelum pemaparan materi hanya 1 orang (5%) dengan pemahaman baik sekali, 3 orang (15%) dengan kategori baik dan 13 orang (80%) dengan kategori cukup dalam memahami manajemen pengelolaan BUM Desa. Hal berbeda didapatkan setelah pemaparan materi yang terbaca dalam hasil *post test*, dimana 10 orang (70%) dengan pemahaman baik sekali, 4 orang (29%) dengan kategori baik dan 1 (5%) orang dengan kategori cukup. Hasil yang didapatkan menunjukkan jika terjadi peningkatan nilai yang artinya kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan terhadap manajemen pengelolaan BUM Des dan penerapan prinsip tata kelola berbasis *good corporate governance*. Hasil ini sekaligus memberikan indikasi bahwa kegiatan pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan di masa mendatang guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUM Desa. Begitu juga dengan pemerintah desa dan BPD sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam mendukung pelaksanaan usaha BUM Desa benar-benar terarah sesuai kebutuhan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Langkah yang diambil untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa Gute Gelekat tentang manajemen tata kelola berbasis *good corporate governance* dilakukan dengan beberapa tahapan yakni: analisis situasi yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan pengurus BUM Desa; pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan post test lalu penyajian materi tentang manajemen tata kelola BUM Desa dan penerapan prinsip tata kelola berbasis *good corporate governance*, lalu dilakukan pre test untuk mengukur tingkat kemampuan peserta setelah mendengarkan materi dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi.

Dengan melihat hasil dari kegiatan ini maka direkomendasikan agar peningkatan kapasitas manajemen tata kelola BUM Desa perlu ditingkatkan pada kegiatan PKM dimasa mendatang. Langkah ini penting untuk membantu ketercapaian fungsi BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah desa Sandosi, BPD Sandosi dan pengurus BUM Desa yang telah berkenan menjadi mitra dalam kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkenan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2019). Bumdes Acceleration Towards Mandiri Village. Iapa Proceedings Conference, 268. <https://doi.org/10.30589/Proceedings.2019.236>
- Baunsele, A. B., Boelan, E. G., Tukan, G. D., Taek, M. M., Amaral, M. A. L., Missa, H., Sooi, A. G., Sinlae, A. A. J., Ratumakin, P. A. K. L., & Ketmoen, A. (2023). Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang-Ntt. *Bakti Cendana*, 6(1), 37-48. <https://doi.org/10.32938/Bc.6.1.2023.37-48>
- Ferdiansyah, H., & Said, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes Dalam Melakukan Product Photography. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5). <https://doi.org/10.31764/Jmm.V6i5.10158>
- Herudiansyah, G., Sahri, Y., Hasanah, T., Andayani, M., & Nugraha, R. (2021). Pedampingan Manajemen Tata Kelola Bumdes Dan Umkm Di Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Suluh Abdi*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.32502/Suluhabdi.V3i2.3976>
- Kiki Endah. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4, 26-33.
- Lestari, N., Setiawan, S., Gunawan, Y., Kwang En, T., Se Tin, Geraldine, & Elvina. (2021). Proses Dan Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Rancabango Garut. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 2(2), 117-127. <https://doi.org/10.35814/Suluh.V2i2.1572>
- Mamelo, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2). <https://doi.org/10.35800/Jjs.V7i2.13558>

- Nelly Sari, R., Junita, D., Anugerah, R., Tri Nanda, S., & Zenita, R. (2022). Effect Of Governance Practices On Value Co-Creation And Organizational Performance: Evidence From Village-Owned Enterprises In Riau, Indonesia. *Problems And Perspectives In Management*, 20(4), 532-543. [https://doi.org/10.21511/Ppm.20\(4\).2022.40](https://doi.org/10.21511/Ppm.20(4).2022.40)
- Purnomo, J. (2016). Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa). *Infest*.
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no3.314>
- Rusdi, M., Madaling, M., & Said, S. (2022). Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Pengurus Bumdes. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 18(2), 163. <https://doi.org/10.33370/Jmk.V18i2.607>
- Sinarwati, N. K., Herawati, N. T., Telagawathi, N. L. W. S., Anggi, S., Sapitri, D., & I Kadek Bhisma Putra Wasuka. (2021). Penyusunan Analisis Kelayakan Unit Usaha Bumdes Di Desa Antiga Kelod. 54-64.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) Performance In Indonesia: An Exploratory Study. *Journal Of Accounting And Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/Jai.2002116>
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal Of Public Finance*, 4(2), 236-249. <https://doi.org/10.30927/Ijpf.584834>
- Syam, M. A., Suratno, & Syahril Djaddang. (2020). Literasi Tatakelola Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). *Capacitarea*, 1(2), 67-79.
- Titania, N. K., & Utami, I. (2021). Apakah Bumdes Sudah Taat Pada Good Governance? *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 77-84. <https://doi.org/10.17977/Um004v8i12021p077>
- Widianingsih, I., Setiawan, H., & Chuddin, M. (2020). Penguatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Cipta Rahayu Di Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 225. <https://doi.org/10.24198/Kumawula.V3i2.26909>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257-288. <https://doi.org/10.24914/Jeb.V22i2.2410>
- Windari, W. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan. *Agirekstensia*, 20(1).
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner*, 6(3), 2789-2799. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i3.945>